



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRUL BAYAN
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
3. NHK : 415943

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.216.696.250

1. Tanah Seluas 3526 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, WARISAN Rp. 190.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 706.696.250

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 212.100.000

1. MOBIL, TOYOTA TGN4OR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA LIPAT BIKE TO WORK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA LIPAT ELEMENT ECOSOSMO Z9 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, YAMAHA GEAR 125 S VESION P 2022 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.900.000
5. MOTOR, YAMAHA FAZZIO TYPE SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 18.860.780

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.544.557.030

III. HUTANG

Rp. 659.840.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 884.716.230

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.